

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan ekonomi yang bersifat universal dan dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang yang masih berjuang menurunkan angka kemiskinan. Dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Fenomena ini mencerminkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional (Todaro & Smith, 2020; Alkire & Foster, 2011).

Menurut United Nations Development Programme (UNDP) yang dikutip oleh Cahyat (2004), faktor-faktor seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan memiliki peran krusial dalam menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemiskinan muncul ketika individu atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum yang menjadi standar hidup layak. Dengan demikian, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan dasar dan memperbaiki kualitas hidupnya. Permasalahan ini bukan hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan politik (Rintuh et al., 2003).

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam mengukur kemiskinan adalah *basic needs approach*, yaitu dengan menilai sejauh mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa kebutuhan pangan maupun non-pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebanyak 26,50 juta jiwa atau sekitar 9,71 persen dari total populasi. Pada Maret 2023, angka tersebut menurun menjadi

25,90 juta jiwa atau 9,36 persen, menunjukkan penurunan sebesar 0,21 poin dari September 2022. Di perkotaan, tingkat kemiskinan menurun menjadi 7,29 persen, sedangkan di perdesaan turun menjadi 12,22 persen.

BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar Rp550.458 per kapita per bulan, dengan komponen kebutuhan makanan menyumbang 74,21 persen (Rp408.522) dan kebutuhan non-makanan sebesar 25,79 persen (Rp141.936). Data ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga miskin masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan dasar.

Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Individu yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan yang memadai, serta bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap. Kondisi tersebut menjadikan kemiskinan sebagai persoalan sosial yang sangat kompleks karena berdampak pada meningkatnya tindak kriminalitas, pengangguran, serta berbagai permasalahan sosial lainnya.

Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian dan perampokan sering kali berkaitan langsung dengan kemiskinan, sedangkan masalah pengangguran dan rendahnya kesehatan berkaitan secara tidak langsung. Keterbatasan ekonomi menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak maupun gizi yang memadai. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Secara makro, kemiskinan juga mencerminkan ketimpangan distribusi sumber daya dan kepemilikan modal yang menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan antar kelompok masyarakat (Kuncoro, 2000). Menurut BPS

Kabupaten Kuningan (2025), tingkat kemiskinan di daerah tersebut mengalami fluktuasi selama periode 2012–2024.

Gambar 1.1 tingkat kemiskinan di kabupaten kuningan



sumber www.bps.go.id 2024

Data menunjukkan bahwa dalam kurun dua belas tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan belum mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Kuningan masih tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan BPS Provinsi Jawa Barat (2024), berikut adalah sepuluh kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi tersebut.

Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat



sumber www.bps.go.id 2024

Menurut BPS Provinsi Jawa Barat (2024), jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada Maret 2024 mencapai 3,89 juta jiwa atau 7,46 persen dari total penduduk. Angka tersebut menurun signifikan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 9,57 persen. Tren penurunan ini menunjukkan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan pemerintah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) pada Maret 2024 berada di angka 1,21 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) sebesar 0,29, keduanya menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk miskin juga semakin kecil.

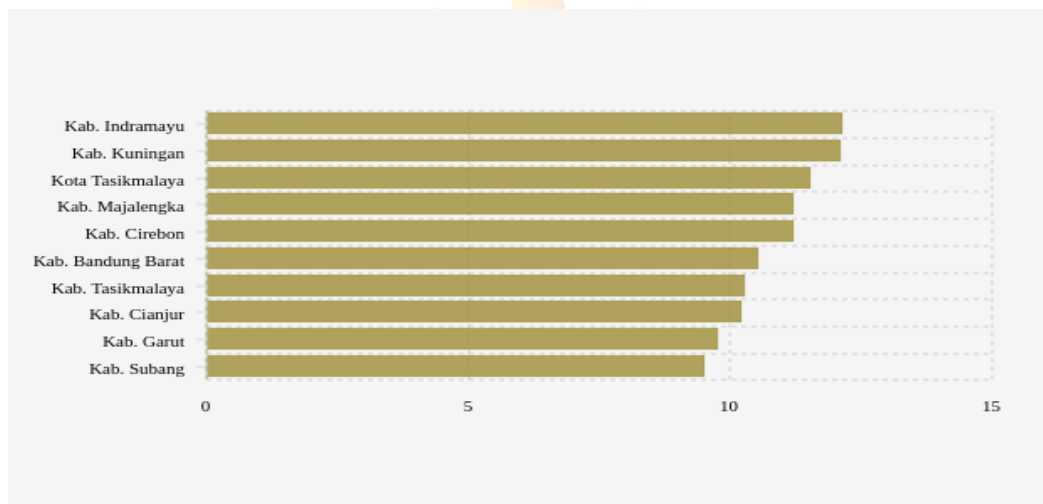
Garis kemiskinan di Jawa Barat pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp524.052 per kapita per bulan, dengan komponen kebutuhan makanan sebesar 74,7 persen dan non-makanan 25,3 persen. Menariknya, dalam rincian komoditas, rokok kretek filter memiliki kontribusi tertinggi sebesar 12,22 persen, melebihi beras dan daging ayam. Fenomena ini menunjukkan adanya pola konsumsi yang kurang produktif di kalangan masyarakat miskin.

Sementara itu, pengeluaran terbesar dalam kelompok non-makanan berasal dari kebutuhan perumahan (23,35 persen), listrik (3,15 persen), dan bahan bakar rumah tangga (2,57 persen). Data ini mempertegas pentingnya kebijakan yang

mendukung efisiensi energi dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Secara umum, meskipun angka kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren menurun, kesenjangan antarwilayah masih cukup besar, di mana daerah pedesaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan Antar Kabupaten Di Jawa Barat



sumber www.bps.go.id 2024

Dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan menempati posisi dua teratas dalam daftar wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat, masing-masing di atas 12 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut membutuhkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Beberapa daerah lain seperti Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon juga memiliki tingkat kemiskinan tinggi, antara 11–12 persen. Hal ini menandakan bahwa kemiskinan tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga di perkotaan.

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat

| No | Kabupaten/Kota | Persentase (%) |
|----|--------------------|----------------|
| 1 | Kab. Indramayu | 12,13 |
| 2 | Kab. Kuningan | 11,88 |
| 3 | Kota Tasikmalaya | 11,53 |
| 4 | Kab. Majalengka | 11,21 |
| 5 | Kab. Cirebon | 11,20 |
| 6 | Kab. Bandung Barat | 10,52 |
| 7 | Kab. Tasikmalaya | 10,28 |
| 8 | Kab. Cianjur | 10,22 |
| 9 | Kab. Garut | 9,77 |
| 10 | Kab. Subang | 9,52 |

Sumber : www.bps.go.id 2024

BPS mencatat bahwa pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai sekitar 3,88 juta jiwa atau 7,62 persen dari total penduduk. Angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Indramayu (12,13 persen) dan Kabupaten Kuningan (11,88 persen), sedangkan yang terendah di Kabupaten Subang (9,52 persen).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pendidikan, keterbatasan modal, kurangnya kesempatan kerja, hingga kondisi sosial ekonomi yang tidak merata.

Secara umum, penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor, yaitu: Faktor individu, meliputi kondisi fisik dan psikologis seseorang yang menyebabkan rendahnya kemampuan beradaptasi terhadap tantangan ekonomi. Faktor sosial, seperti diskriminasi gender, usia, atau etnis yang menghambat akses terhadap sumber daya ekonomi. Faktor kultural, yang berkaitan dengan sikap dan mentalitas, seperti malas, fatalisme, dan rendahnya etos kerja. Faktor struktural, yang muncul akibat sistem ekonomi yang tidak adil dan lebih menguntungkan kelompok kaya.

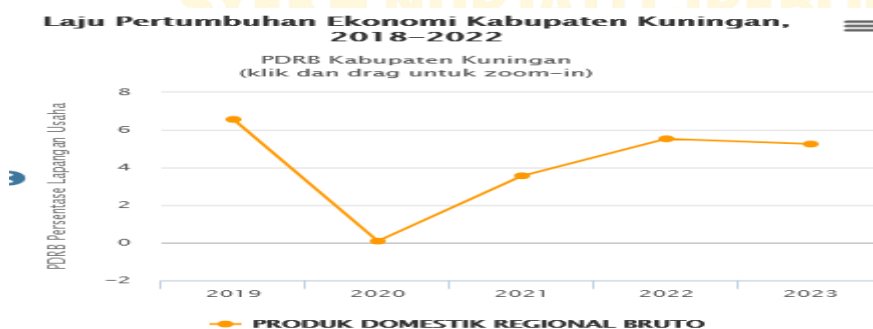
Dalam konteks daerah, penyebab kemiskinan di Kabupaten Kuningan antara lain keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada sektor pertanian, rendahnya pendidikan dan keterampilan, pertumbuhan penduduk yang cepat, pengangguran tinggi, keterbatasan akses modal, serta inflasi dan harga bahan pokok yang meningkat.

Dari perspektif Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai isu sosial dan spiritual yang memengaruhi kualitas kehidupan umat. Islam menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar agar umat dapat menjalankan ibadah dan kewajiban agama dengan baik (Hasan, 2006; Qaradhawi, 2001).

Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah berfungsi tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kerja keras, kejujuran dalam berdagang, dan pengelolaan sumber daya yang baik (Al-Ghazali, 2000). Pendidikan dalam Islam dipandang sebagai alat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap Muslim (Al-Attas, 1993).

Dengan demikian, kemiskinan bukanlah takdir yang tidak dapat diubah, tetapi tantangan sosial yang harus diselesaikan secara kolektif melalui pemberdayaan dan sistem distribusi yang adil (Chapra, 2000).

Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kuningan



Sumber: www.bps.go.id 2023

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan berada di angka 0.11% yang memang tergolong cukup kecil. Namun, hal tersebut tergolong wajar disaat banyak daerah lain yang mempunyai pertumbuhan ekonomi negatif saat kondisi COVID-19. Setelah proses pembangunan mulai terlaksana dan meredanya pandemi COVID-19, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kuningan mengalami perkembangan ke angka 3.56% pada tahun 2021. Tren positif pun terus terjadi pada tahun 2022 yang mana pertumbuhan ekonomi Kuningan berada di angka 5.53% yang memang menunjukkan bahwa roda perekonomian terpacu oleh proyek besar Pemda Kuningan ini.

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan dari suatu negara, dimana negara tersebut dikatakan semakin maju apabila terdapat peningkatan pada pembangunannya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018). Pada dasarnya, tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakatnya secara merata (Simatupang, 2003).

Jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, maka masyarakat tersebut dapat disebut sejahtera. Menurut Zulhanafi et al., (2013), penambahan lapangan kerja agar pengangguran berkurang serta meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan nasional, salah satu indikatornya adalah laju penurunan tingkat penduduk miskin. Tujuan utama dalam menentukan strategi atau instrumen pembangunan adalah efektivitas dalam menurunkan tingkat penduduk miskin (Simatupang, 2003).

pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (necessary condition) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (sufficient condition) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*) Siregar dan Dwi (2008).

Rendahnya partisipasi pendidikan dan angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin disebabkan tidak memiliki dana yang cukup untuk bersekolah di jenjang yang lebih tinggi, karena pendidikan tinggi membutuhkan biaya yang relatif besar. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa dengan menyekolahkan anak maka, mereka akan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Hal ini menjadi alasan bagi masyarakat untuk memperkerjakan anak-anak mereka diusia sekolah. Konteks ini, membuktikan pendidikan merupakan medium tentang upaya mengatasi masalah kemiskinan.

Pemerintah perlu terus meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berfokus pada peningkatan harapan rata-rata lama sekolah sehingga dapat mengurangi masalah kemiskinan karena angka putus sekolah yang meningkat. Masalah pengangguran juga sangat berperan mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Sukirno (2006) mengemukakan bahwa pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Dimana, semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah yaitu kemiskinan. Angkatan kerja yang tumbuh cepat akan menambah beban tersendiri bagi perekonomian yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja.

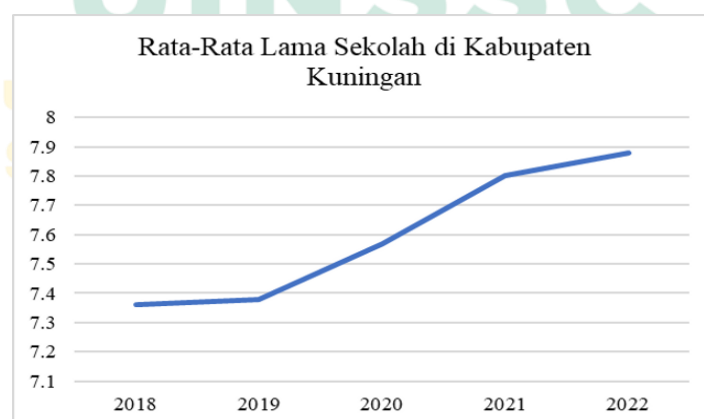
Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja maka bagian angkatan kerja itu akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada (Dumairy, 1996). Ada beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah pusat, baik di tingkat provinsi serta di tingkat kabupaten dan kota antara lain dalam bidang kesehatan yaitu program KIS (Kartu Indonseia Sehat), dalam bidang pendidikan yaitu PIP (Program Indonesia Pintar), serta dalam bidang sosial yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dan bagi para pengusaha UMKM, pemerintah memberikan bantuan modal usaha melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Program-program tersebut telah dijalankan oleh pemerintah selama kurang lebih 5 tahun terakhir dalam menanggulangi tingkat kemiskinan, tetapi masih jauh dari pokok masalahnya.

Sebab kebijakan dan program tersebut belum mencapai hasil yang optimal, dikarenakan masih adanya kesenjangan terhadap rencana dalam pencapaian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan tersebut. Dalam penanggulangan kemiskinan ini diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan terpadu, terintegrasi yang sistematis dan tidak dilakukan sendiri-sendiri, tetapi sinergi antar lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan secara tuntas.

Dengan berbagai program pengentasan yang telah dilakukan oleh pemerintah namun kemiskinan masih tetap menjadi hambatan dan menjadi perhatian utama. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai indikator kesejahteraan di suatu wilayah, Menurut Mankiw (2007). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produktif sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Sukirno (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupan (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar di setiap golongan pendapat, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*) Sukirno (2013).

Gambar 1.5 Tingkat Pendidikan



Sumber : www.bps.go.id 2022

Pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan individu maupun bangsa. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup, baik melalui akses terhadap pekerjaan yang layak maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Individu yang berpendidikan tinggi umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap dunia kerja dan proses pembangunan nasional (Todaro & Smith, 2020).

Lebih jauh, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai media pembentuk pola pikir yang kritis dan bijaksana. Individu yang terdidik cenderung mampu menilai suatu persoalan dengan lebih objektif serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etika dan sosial yang matang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu strategi utama dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat (UNESCO, 2015).

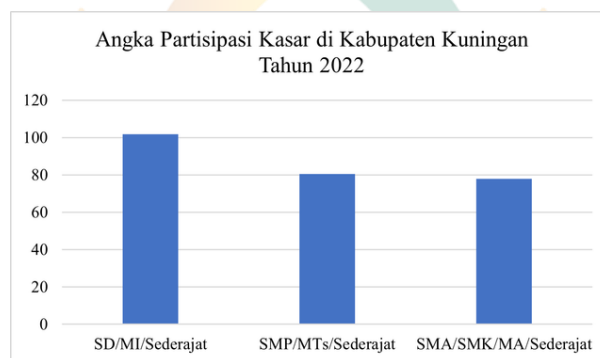
Untuk menilai kondisi pendidikan suatu daerah, termasuk Kabupaten Kuningan, diperlukan indikator kuantitatif yang mampu menggambarkan tingkat akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Beberapa indikator utama yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam evaluasi dan perumusan kebijakan pendidikan daerah (BPS, 2024).

RLS menggambarkan rata-rata lamanya penduduk usia lima belas tahun ke atas menempuh pendidikan formal. Dalam kurun lima tahun terakhir, RLS Kabupaten Kuningan menunjukkan tren peningkatan meskipun masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Pada tahun 2022, nilai RLS Kabupaten Kuningan tercatat sebesar 7,88 tahun, yang berarti rata-rata penduduk di wilayah ini hanya menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah

Pertama (SMP). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kuningan masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mencapai target wajib belajar dua belas tahun.

Indikator berikutnya, Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk yang memenuhi usia sekolah pada jenjang yang sama. Hasil pengukuran tahun 2022 memperlihatkan bahwa nilai APK di Kabupaten Kuningan menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit masyarakat yang melanjutkan studi ke tingkat tersebut.

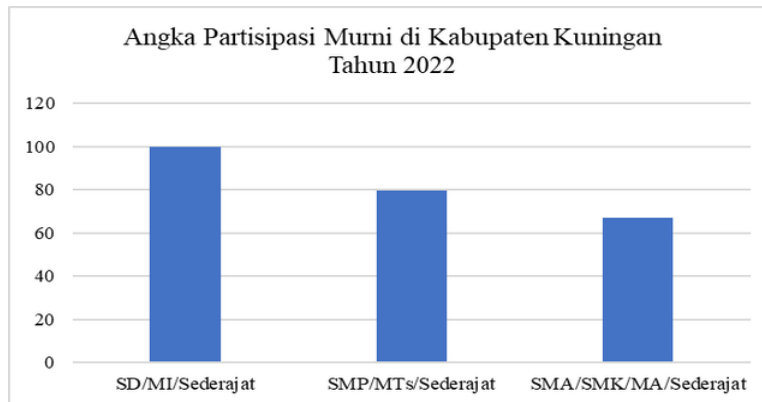
Gambar 1.6 Tingkat Pendidikan



Sumber : www.bps.go.id 2022

Selain APK, Angka Partisipasi Murni (APM) juga menjadi indikator penting untuk menilai partisipasi pendidikan. APM mengukur proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Indikator ini dinilai lebih akurat dalam menggambarkan kondisi partisipasi pendidikan karena memperlihatkan sejauh mana anak-anak bersekolah tepat waktu sesuai jenjang yang semestinya. Namun, sama seperti APK, APM Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 juga menunjukkan tren penurunan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit penduduk yang menempuh pendidikan sesuai dengan usianya.

Gambar 1.7 Tingkat Pendidikan



Sumber : www.bps.go.id 2022

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap ketiga indikator tersebut RLS, APK, dan APM dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kuningan baru menempuh pendidikan hingga kelas satu SMP. Kondisi ini memperlihatkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal, terutama di jenjang menengah atas dan pendidikan tinggi (BPS Kabupaten Kuningan, 2024).

Rendahnya angka partisipasi pendidikan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan anggapan bahwa manfaat pendidikan tidak dapat dirasakan secara langsung. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap lembaga pendidikan di daerah terpencil mendorong sebagian masyarakat memilih untuk menikah di usia muda daripada melanjutkan pendidikan. Fenomena pernikahan dini ini tidak hanya menghambat pendidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial seperti meningkatnya angka putus sekolah dan risiko kesehatan pada usia muda (UNICEF Indonesia, 2021).

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Kuningan harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memperluas pembangunan sekolah menengah atas di wilayah-wilayah yang masih kekurangan

fasilitas pendidikan. Namun demikian, peningkatan akses pendidikan perlu diimbangi dengan peningkatan mutu pembelajaran, antara lain melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sarana belajar yang lengkap, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik sebagai ujung tombak proses belajar-mengajar (Kemendikbudristek, 2022).

Selain itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya para orang tua, mengenai pentingnya pendidikan sebagai modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan seluruh unsur masyarakat — mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas lokal. Kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak inilah yang akan menjadi kunci dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di Kabupaten Kuningan.

Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran



Sumber : www.bps.go.id 2022

Tingkat pengangguran di Kabupaten Kuningan tergolong cukup tinggi, sebagaimana tercermin dalam nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih di atas rata-rata. Kondisi ini tidak hanya dipicu oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan 2018–2022, dijelaskan bahwa rendahnya serapan tenaga kerja profesional dengan keterampilan khusus

menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya pengangguran di wilayah tersebut (Bappeda Kabupaten Kuningan, 2018). Dengan kata lain, terdapat kesenjangan (mismatch) antara kemampuan tenaga kerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lapangan.

Seiring dengan terbatasnya jumlah lapangan kerja formal, pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi alternatif penting yang perlu dimaksimalkan. Kabupaten Kuningan memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, yang jika dikelola dengan baik dapat membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kuningan, Ukas Suharfa Putra, salah satu solusi strategis dalam menekan angka pengangguran adalah melalui peningkatan investasi di bidang pertanian (agriculture investment). Langkah ini tidak hanya memberdayakan tenaga kerja lokal, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk agrikultur daerah (Kuninganmass.com, 2022).

Selain sektor pertanian, penguatan kewirausahaan juga merupakan langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mengurangi pengangguran. Aktivitas kewirausahaan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi orang lain. Agar program ini berhasil, dibutuhkan dukungan berupa pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan, terutama bagi kelompok usia produktif dan penganggur terbuka. Pemerintah daerah berperan penting dalam memfasilitasi pelatihan tersebut melalui kolaborasi lintas sektor dan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2021).

Gambar 1.9 Tingkat Pengangguran



Sumber : [www,bps.go.id](http://www.bps.go.id) 2023

Masalah pengangguran merupakan fenomena yang hampir dihadapi seluruh daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Kuningan. Bahkan, isu ini telah ditetapkan sebagai salah satu isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Kuningan periode 2018–2023, karena memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Isu strategis tersebut muncul akibat masih tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan belum optimalnya penciptaan lapangan kerja.

Menariknya, data Kabupaten Kuningan Dalam Angka 2023 yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bekerja dari kelompok yang tidak pernah bersekolah ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Fakta ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam ketersediaan pekerjaan, di mana tenaga kerja berpendidikan tinggi belum terserap secara optimal oleh pasar kerja.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan. Namun, temuan yang dihasilkan menunjukkan adanya ketidakselarasan hasil (inconsistency) antarpelitian. Misalnya, sebagian penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Sukmana, 2022; Alwi et al., 2021), sementara penelitian lain justru menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan (Kusumo, 2021).

Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan bahwa penjelasan mengenai determinan kemiskinan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Selain itu, beberapa studi menekankan peran penting tingkat pendidikan terhadap kemiskinan, di mana pendidikan terbukti mampu menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (Annisa & Anwar, 2021; Ishak et al., 2020). Namun, penelitian lain justru menyatakan bahwa pendidikan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Alwi et al., 2021). Perbedaan hasil tersebut menandakan bahwa hubungan antara pendidikan dan kemiskinan belum sepenuhnya terjelaskan, khususnya pada level daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda.

Selanjutnya, variabel pengangguran juga menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Penelitian Ishak et al. (2020) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa pengangguran dapat berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan (Alwi et al., 2021). Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana peran pengangguran di wilayah dengan pasar kerja yang terbatas seperti Kabupaten Kuningan.

Hasil penelitian terdahulu juga sebagian besar dilakukan pada cakupan provinsi atau wilayah yang luas, seperti Provinsi Aceh, Jawa Tengah, dan tingkat nasional. Riset yang menggunakan konteks Kabupaten Kuningan dengan karakteristik ekonomi, struktur pendidikan, dan dinamika pengangguran yang sangat spesifik masih sangat terbatas. Padahal, perbedaan karakter wilayah dapat berpengaruh terhadap hasil analisis.

Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak menggunakan Indeks Kedalaman PDRB sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan indikator umum seperti persentase penduduk miskin atau indeks pembangunan manusia, sementara kedalaman PDRB dapat

memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kondisi ekonomi masyarakat secara regional.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan. Hasil analisis Sukmana (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan selama periode 2014–2023. Dengan kata lain, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Annisa & Anwar (2021) dalam studi berjudul *“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Provinsi Aceh)”*, yang menyimpulkan bahwa variabel tingkat kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin baik kondisi kesehatan masyarakat, semakin rendah pula angka kemiskinan.

Selain itu, Kusumo (2021) dalam penelitiannya di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa variabel pendidikan, pengangguran, dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sementara itu, penelitian oleh Ishak, Zakaria, dan Arifin (2020) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan tingkat pendidikan—yang diukur melalui rata-rata lama sekolah—berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Alwi, Syaparudin, dan Hardiani (2021) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran. Namun, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara tingkat pendidikan tidak. Selain itu, pengangguran terbukti memiliki pengaruh signifikan

terhadap kemiskinan dan berperan sebagai variabel intervening antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, karena memperkuat pengaruh keduanya.

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat multidimensional, karena tidak hanya meninjau kemiskinan dari aspek ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan tiga faktor utama, yakni pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran, untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai determinan kemiskinan. Penelitian ini juga menelusuri interaksi antarvariabel, khususnya bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran memengaruhi tingkat kemiskinan — sesuatu yang jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Selain itu, penggunaan data kontekstual dan spesifik wilayah memungkinkan hasil penelitian ini lebih relevan bagi kebijakan lokal. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang realistis dan dapat diterapkan secara praktis. Temuan ini juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 1 (penghapusan kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), dan SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek berikut:

Mengintegrasikan tiga variabel utama secara simultan pada level kabupaten. Penelitian ini menggabungkan pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan pengangguran secara bersamaan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Pendekatan multidimensional seperti ini jarang dilakukan di penelitian terdahulu yang umumnya hanya menguji dua variabel atau melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Menggunakan konteks wilayah yang spesifik. Penelitian ini secara khusus meneliti Kabupaten Kuningan, yang memiliki karakter ekonomi dan sosial yang berbeda dengan provinsi atau wilayah lain yang menjadi fokus banyak penelitian terdahulu. Analisis berbasis wilayah

spesifik ini memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan untuk mendukung perumusan kebijakan daerah. Memanfaatkan Indeks Kedalaman PDRB sebagai indikator kemiskinan

Penelitian ini menggunakan Indeks Kedalaman PDRB, yang jarang digunakan dalam penelitian terdahulu, sehingga memberikan sudut pandang baru dalam mengukur kondisi kemiskinan. Indikator ini lebih mampu menggambarkan sejauh mana distribusi pendapatan memengaruhi kemiskinan, bukan hanya jumlah penduduk miskin. Mengkaji interaksi variabel pendidikan dan pengangguran dalam memengaruhi kemiskinan

Penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh langsung masing-masing variabel, tetapi juga menyoroti kemungkinan interaksi antara tingkat pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan. Pendekatan ini memberikan kontribusi teoritis yang lebih mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang bersifat linear dan parsial. Menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based) dengan mempertimbangkan tiga faktor secara simultan

Dengan memadukan tiga faktor utama penentu kemiskinan, penelitian ini mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih integratif dan relevan dengan kondisi aktual Kabupaten Kuningan, sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

penelitian ini berfokus pada analisis tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan, yang diukur menggunakan Indeks Kedalaman PDRB, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran sebagai variabel yang memengaruhi kondisi kemiskinan di daerah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun dapat menghambat pembangunan di suatu daerah dan mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Rendahnya pendidikan seseorang dapat menyebabkan berkurangnya pengetahuan dan keterampilan, sehingga meningkatkan pengangguran.
3. Banyaknya jumlah pengangguran menyebabkan tingginya kemiskinan.
4. Kemiskinan dapat menyebabkan kelesuan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus, maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Dimana pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sebagai variabel X (independen). Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian adalah Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan dari suatu tahun terhadap tahun sebelumnya yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah.

Sedangkan pengangguran sebagaimana diketahui secara teori ada beberapa jenis pengangguran diantaranya pengangguran terbuka, pengangguran bermusim, pengangguran tersembunyi dan pengangguran setengah menganggur. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan jenis pengangguran terbuka sebagai indikator dalam penelitian.

Tingkat kemiskinan dalam penelitian ini adalah sebagai variabel Y (dependen). Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidak berdayaan

seseorang atau suatu golongan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar yang layak, meliputi pangan dan non pangan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat diambil yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten kuningan?
- b. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten kuningan?
- c. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten kuningan?
- d. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten kuningan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten kuningan.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten kuningan.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten kuningan.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran tingkat pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten kuningan.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Dapat meningkatkan pemahaman tentang dampak pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten kuningan.

2. Sebagai sumber informasi, referensi, dan literatur tentang kemiskinan di kabupaten kuningan.
3. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan di kabupaten kuningan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan terhadap permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar bagi peneliti.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**